



KONFERENSI KERJA PROVINSI I PGRI JAMBI TAHUN 2026

*Memperkokoh Solidaritas dan Transformasi PGRI,
menuju Guru Bermutu - Jambi Mantap - Indonesia Maju.*



Jambi, 24-25 Oktober 2026
Hotel Sutha Inn Syariah, Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029 ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 24-25 Oktober 2026 di Hotel Sutha Inn Syariah, Jambi, merupakan forum organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, menyusun rencana program, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan strategis di bidang organisasi, pendidikan, dan keprofesian.

Buku ini memuat kerangka acuan dan rancangan keputusan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi yang meliputi: (1) tata tertib konferensi; (2) jadwal acara; (3) laporan pelaksanaan program kerja Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2025–Juni 2026; (4) laporan pertanggungjawaban keuangan periode Juli 2025–Juni 2026; (5) program mandatori dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) periode Juli 2026–Juni 2027; (6) penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional Tahun 2026; (7) pembentukan Panitia Pemeriksa Keuangan Tahun 2027; serta (8) pernyataan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026, beserta lampiran-lampirannya.

Melalui konferensi ini, PGRI meneguhkan komitmennya untuk mendukung terwujudnya pendidikan bermutu bagi semua sebagai bagian dari pemenuhan hak setiap warga negara atas layanan pendidikan yang berkualitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui dorongan terhadap perluasan akses, pemerataan kesempatan, serta peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

PGRI juga menempatkan perlindungan guru sebagai salah satu prioritas utama organisasi. Perlindungan tersebut mencakup aspek hukum, profesi, keselamatan, dan kepastian dalam menjalankan tugas keprofesian. Oleh karena itu, PGRI terus mendorong penguatan regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada guru, termasuk percepatan pembahasan dan penetapan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan profesi guru.

Selain itu, penguatan organisasi secara struktural dan kultural serta percepatan transformasi digital menjadi agenda penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas kinerja PGRI di semua tingkatan.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam persiapan penyelenggaraan konferensi ini. Penghargaan khusus kami sampaikan kepada pengurus PGRI kabupaten/kota serta PGRI cabang dan



kecamatan se-Provinsi Jambi atas partisipasi dan dukungannya dalam mensukseskan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat mengikuti Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026. Semoga konferensi ini menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi, peningkatan mutu pendidikan, dan perlindungan profesi guru. Semoga Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi PGRI dan meridhoi setiap langkah perjuangan kita. Aamiin.

Jambi, 20 Oktober 2026
Ketua,

H. Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd.
NPA. 1571012642

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TATA TERTIB KONFERENSI KERJA I	6
2.1 Rancangan Keputusan tentang Tata Tertib Konferensi Kerja I	6
2.2 Lampiran Rancangan Tata Tertib Konferensi Kerja I	9
BAB III JADWAL ACARA KONFERENSI KERJA I	15
3.1 Rancangan Keputusan tentang Jadwal Acara	15
3.2 Lampiran Jadwal Acara Konferensi Kerja I	18
BAB IV LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEUANGAN	21
4.1 Rancangan Keputusan tentang Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Keuangan	21
4.2 Lampiran 1: Laporan Pelaksanaan Program Kerja	24
4.3 Lampiran 2: Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	32
BAB V. PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN ORGANISASI	37
5.1 Rancangan Keputusan tentang Program Mandatori dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi	37
5.2 Lampiran 1: Program Mandatori Pengurus PGRI Provinsi Jambi	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan berkualitas untuk semua merupakan salah satu agenda strategis pembangunan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mewujudkannya memerlukan kebijakan yang tepat, tata kelola pendidikan yang efektif, pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) telah menetapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain melalui wajib belajar 13 tahun, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam, penguatan karakter, pendidikan inklusif, pengembangan talenta, dan perbaikan sarana prasarana. Keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan kesiapan satuan pendidikan, guru, kepala sekolah, pengawas, pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan perlu diimplementasikan secara terencana, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta dievaluasi secara berkelanjutan.

Sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional. PGRI terus memperjuangkan peningkatan kompetensi, kesejahteraan, profesionalitas, dan perlindungan guru, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan. Persoalan guru honorer yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian serta kepastian kesejahteraan guru PPPK paruh waktu juga perlu mendapat perhatian bersama.

PGRI memandang bahwa peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan jati diri dan profesionalitas guru. Implementasi kebijakan pendidikan, termasuk pembelajaran mendalam dan pengelolaan kepemimpinan sekolah, perlu didukung oleh kesiapan sumber daya manusia, pendampingan yang memadai, serta regulasi yang memberikan kepastian. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat memberikan manfaat nyata bagi guru, peserta didik, dan masyarakat.

Sejak berdiri pada 25 November 1945, PGRI telah berperan dalam perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan mutu pendidikan, serta membela hak dan kepentingan guru. Dalam menjalankan perannya, PGRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menjunjung tinggi sifat unitaristik, independen, dan nonpartisan. PGRI juga terus memperkuat solidaritas, mengembangkan kerja sama di tingkat nasional dan internasional, serta menjaga martabat organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI.

Sebagai tindak lanjut keputusan Kongres XXIII PGRI Masa Bakti 2024–2029, seluruh jajaran organisasi berkewajiban melaksanakan program kerja secara terarah dan bertanggung jawab. Pada tingkat provinsi, Pengurus PGRI Provinsi Jambi perlu mengevaluasi pelaksanaan program, menyusun rencana kerja, menetapkan program mandatori, serta mengelola anggaran organisasi secara transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan ketentuan AD/ART PGRI, Konferensi Kerja PGRI Provinsi merupakan forum organisasi untuk membahas dan menilai pelaksanaan keputusan organisasi, menetapkan program kerja tahunan, serta merumuskan kebijakan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 diselenggarakan pada 24–25 Oktober 2026 di Jambi.

Konferensi ini menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan pertanggungjawaban keuangan periode sebelumnya, menetapkan program mandatori dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) periode Juli 2026–Juni 2027, serta membahas berbagai agenda strategis organisasi. Melalui konferensi ini, diharapkan lahir keputusan yang konstruktif dan implementatif untuk memperkuat organisasi, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru, serta mendukung terwujudnya pendidikan berkualitas bagi semua di Provinsi Jambi.

B. Landasan

Penyelenggaraan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 berlandaskan pada:

1. Anggaran Dasar (AD) PGRI Bab XXVI Pasal 34 tentang Forum Organisasi dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI Bab XXV Pasal 69 tentang Jenis Forum Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI Bab XXXI Pasal 100 sampai dengan Pasal 104 tentang Konferensi Kerja PGRI Provinsi.

3. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Nomor 306/Kep/PGRI.Jambi/XXIII/2026 tentang Penyelenggaraan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.
4. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Nomor 307/Kep/PGRI.Jambi/XXIII/2026 tentang Pembentukan Panitia Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

C. Tema

Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 mengusung tema dan subtema sebagai berikut.

Tema:

“Memperkuat solidaritas, transformasi PGRI, menuju Guru Bermutu, Indonesia Maju.”

Subtema:

“PGRI Jambi Siap Menyukseskan Program Berani Cerdas untuk Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pendidikan.”

D. Waktu dan Tempat

Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 dilaksanakan pada 24–25 Oktober 2026, bertempat di Hotel Sutha Inn Syariah, Jambi.

E. Agenda

Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 membahas agenda pokok sebagai berikut:

1. Laporan pelaksanaan program mandatori dan program kerja Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2025-Juni 2026.
2. Penetapan program mandatori dan program kerja Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2026-Juni 2027.
3. Pembahasan dan penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) periode Juli 2026-Juni 2027.
4. Pengembangan persekolahan PGRI.
5. Pembahasan isu-isu aktual pendidikan, meliputi implementasi pembelajaran mendalam dan Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA), periodisasi kepala sekolah, PPPK paruh waktu, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
6. Pembahasan dan penetapan Pernyataan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026.
7. Pembahasan dan penetapan keputusan strategis organisasi.

F. Hasil yang Diharapkan

Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 diharapkan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Penetapan tata tertib dan jadwal acara Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026.
2. Penerimaan dan penetapan laporan pelaksanaan program kerja serta pertanggungjawaban keuangan Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2025–Juni 2026.
3. Penetapan program mandatori dan program kerja Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2026-Juni 2027.
4. Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (RAPBO) Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2026-Juni 2027.
5. Penetapan penyelenggaraan puncak peringatan HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2026 tingkat Provinsi Jambi.
6. Penetapan mekanisme pengumpulan dan pendistribusian iuran anggota PGRI.
7. Penguatan peran dan fungsi perangkat kelengkapan organisasi PGRI Provinsi Jambi.
8. Penetapan Tim Verifikasi Keuangan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026.
9. Penetapan rotasi dan pergantian antar waktu (PAW) dalam struktur Pengurus PGRI Provinsi Jambi Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029.
10. Penetapan Pernyataan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026.

G. Peserta

Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI Bab XXXI Pasal 102, peserta Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 terdiri atas:

1. Utusan Pengurus Besar PGRI.
2. Pengurus PGRI Provinsi Jambi.
3. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat provinsi.
4. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
5. Utusan Pengurus PGRI Cabang/Kecamatan se-Provinsi Jambi.
6. Undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus PGRI Provinsi Jambi.

H. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 ditanggung bersama oleh Pengurus PGRI Provinsi Jambi, Pengurus PGRI

Kabupaten/Kota, Pengurus PGRI Cabang/Kecamatan se-Provinsi Jambi, serta pihak lain yang memberikan dukungan secara sah dan tidak mengikat.

I. Tata Tertib Konferensi Kerja

1. Setiap peserta wajib melakukan registrasi ulang pada saat kedatangan.
2. Dokumen konferensi diberikan kepada peserta pada saat registrasi ulang.
3. Peserta wajib mengenakan seragam Batik PGRI Kusuma Bangsa dan atribut PGRI lainnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
4. Selama kegiatan berlangsung, peserta wajib mengatur telepon seluler dalam mode diam agar tidak mengganggu jalannya acara dan penyampaian materi.
5. Rapat pleno dipimpin oleh pimpinan sidang yang ditetapkan sesuai dengan tata tertib konferensi.
6. Rapat komisi dipimpin oleh pimpinan komisi yang dipilih dan ditetapkan oleh anggota komisi.
7. Setiap Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan
8. Pandangan umum dan laporan pelaksanaan program kerja periode Juli 2025–Juni 2026.
9. Keputusan diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

BAB II
RANCANGAN KEPUTUSAN
KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

NOMOR:/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026

TENTANG

TATA TERTIB KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029,

Menimbang:

- a. bahwa Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 merupakan forum organisasi yang diselenggarakan pada tanggal 24–25 Oktober 2026 di Jambi;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan konferensi yang tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan organisasi, perlu menetapkan Tata Tertib Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 tentang Tata Tertib Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

Mengingat:

1. Akta Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai Badan Hukum, sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024;
2. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor IV/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Program Persatuan Guru Republik Indonesia dan Anggaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;

3. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
4. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor X/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Penetapan Ketua Umum, Ketua, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
5. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 08/Kep/PB/XXIII/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
6. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 32/Kep/PB/XXIII/2026 tanggal 3 September 2026 tentang Susunan dan Personalia Pengurus dan Dewan Pembina PGRI Provinsi Jambi Penggantian Antarwaktu Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
7. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Nomor 306/Kep/PGRI.Jambi/XXIII/2026 tentang Penyelenggaraan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

Memperhatikan:

Saran dan pendapat yang disampaikan dalam Rapat Pleno Pertama Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:**

KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029 TENTANG TATA TERTIB KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029.

KESATU:

Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 yang diselenggarakan pada tanggal 24–25 Oktober 2026 di Jambi.

KEDUA:

Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan hasil pembahasan dan persetujuan atas rancangan tata tertib dalam Rapat Pleno Pertama Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026.

KETIGA:

Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT:

Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman

bagi seluruh peserta dan penyelenggara dalam mengikuti dan melaksanakan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

KELIMA:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi

Pada tanggal: 24 Oktober 2026

PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI

Selaku

PIMPINAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI
TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Ketua,

Sekretaris Umum,

H. Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd.
NPA. 15710126423

Khairu Azmi, S.P., M.M.
NPA. 15040505254

**LAMPIRAN : RANCANGAN KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI
JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029**

Nomor : 24/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026

Tanggal : 24 Oktober 2026

Tentang : Tata Tertib Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa
Bakti XXIII Tahun 2024–2029

TATA TERTIB
KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

A. STATUS, KEWAJIBAN, DAN TEMA

1. Status Konferensi Kerja PGRI Provinsi

Status Konferensi Kerja PGRI Provinsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI hasil Kongres XXIII Tahun 2024, Bab XXXI Pasal 100, adalah sebagai berikut:

- a. Konferensi Kerja PGRI Provinsi merupakan rapat antar-Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi serta merupakan forum organisasi tertinggi di bawah Konferensi PGRI Provinsi.
- b. Konferensi Kerja PGRI Provinsi bertugas menetapkan program kerja tahunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO), serta kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi PGRI Provinsi.
- c. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota turut bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan Konferensi Kerja PGRI Provinsi.

2. Kewajiban Konferensi Kerja PGRI Provinsi

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PGRI Bab XXXI Pasal 104, kewajiban Konferensi Kerja PGRI Provinsi meliputi:

- a. Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Konferensi PGRI Provinsi.
- b. Menetapkan program kerja tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi PGRI Provinsi.
- c. Menetapkan program kerja lima tahunan pada Konferensi Kerja PGRI Provinsi pertama dalam masa bakti kepengurusan.

- d. Menetapkan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus PGRI Provinsi yang berhalangan tetap, berhenti, dan/atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- e. Menetapkan APBO PGRI Provinsi untuk tahun berjalan.
- f. Mengesahkan laporan PGRI Provinsi selama lima tahun masa bakti kepengurusan pada Konferensi Kerja PGRI Provinsi.
- g. Menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan, Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara, serta panitia khusus untuk Konferensi PGRI Provinsi yang akan datang pada Konferensi Kerja PGRI Provinsi terakhir.

3. Tema Konferensi

Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 mengusung tema dan subtema sebagai berikut.

Tema:

“Memperkuat solidaritas, transformasi PGRI, menuju Guru Bermutu, Indonesia Maju.”

Subtema:

“PGRI Jambi Siap Menyukseskan Program Berani Cerdas untuk Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pendidikan.”

B. WAKTU DAN TEMPAT

Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu–Minggu, 24–25 Oktober 2026

Tempat : Hotel Sutha Inn Syariah, Jambi

C. PIMPINAN, PENYELENGGARA, DAN PESERTA

1. Pimpinan dan Penyelenggara

- a. Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi Jambi.
- b. Pelaksanaan konferensi menjadi tanggung jawab Pengurus PGRI Provinsi Jambi sesuai dengan ketentuan organisasi.

2. Peserta Konferensi

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PGRI Bab XXXI Pasal 102, peserta Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 terdiri atas:

- a. Utusan Pengurus Besar PGRI.
- b. Pengurus PGRI Provinsi Jambi.
- c. Utusan perangkat kelengkapan organisasi tingkat provinsi.
- d. Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.

- e. Utusan Pengurus PGRI Cabang/Kecamatan se-Provinsi Jambi.
- f. Undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus PGRI Provinsi Jambi.

D. JENIS SIDANG

1. Persidangan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 meliputi:
 - a. Sidang pembukaan;
 - b. Sidang pleno;
 - c. Sidang komisi, apabila diperlukan; dan
 - d. Sidang penutupan.
2. Sidang pleno dipimpin oleh Pengurus PGRI Provinsi Jambi selaku pimpinan konferensi.
3. Pimpinan sidang bertugas menjaga ketertiban, kelancaran, dan kesesuaian jalannya persidangan dengan tata tertib yang telah disahkan.

E. KUORUM DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Kuorum

Konferensi Kerja PGRI Provinsi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah kepengurusan PGRI Kabupaten/Kota yang memiliki hak mengikuti konferensi, sesuai dengan ketentuan AD/ART PGRI yang berlaku.

2. Kewajiban Peserta

Setiap peserta konferensi wajib:

- a. Mematuhi tata tertib dan keputusan konferensi.
- b. Mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Menjaga ketertiban, kesantunan, dan suasana musyawarah selama persidangan.
- d. Menghormati hak peserta lain dalam menyampaikan pendapat.
- e. Menjaga nama baik dan martabat organisasi PGRI.

F. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Keputusan konferensi diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan ketentuan hak suara yang berlaku.

3. Keputusan yang telah disahkan dalam persidangan menjadi ketetapan konferensi dan wajib dihormati serta dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

G. HAK BICARA DAN HAK SUARA

1. Hak Bicara

Berdasarkan Anggaran Rumah Tangga PGRI Bab XXXI Pasal 103:

- a. Setiap peserta konferensi mempunyai hak bicara sesuai dengan ketentuan organisasi.
- b. Penggunaan hak bicara dilaksanakan atas izin pimpinan sidang dengan tetap memperhatikan ketertiban dan alokasi waktu persidangan.

2. Hak Suara

- a. Hak suara diberikan kepada utusan yang berhak sesuai dengan ketentuan AD/ART PGRI.
- b. Penggunaan hak suara dilakukan oleh utusan yang memiliki mandat sah.
- c. Jumlah hak suara setiap utusan ditetapkan berdasarkan ketentuan organisasi dan hasil verifikasi mandat serta hak suara.

3. Hak Suara Utusan PGRI Kabupaten/Kota

- a. Setiap PGRI Kabupaten/Kota memperoleh 1 (satu) suara dasar.
- b. Selain suara dasar sebagaimana dimaksud pada point a, setiap PGRI Kabupaten/Kota memperoleh suara tambahan berdasarkan tingkat keaktifan pembayaran iuran anggota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran iuran 100% atau lunas memperoleh 5 (lima) suara tambahan;
 - 2) Pembayaran iuran 75%–99% memperoleh 4 (empat) suara tambahan;
 - 3) Pembayaran iuran 50%–74% memperoleh 3 (tiga) suara tambahan;
 - 4) Pembayaran iuran 25%–49% memperoleh 2 (dua) suara tambahan;
 - 5) Pembayaran iuran kurang dari 25% memperoleh 1 (satu) suara tambahan.

4. Hak Suara Utusan PGRI Cabang/Cabang Khusus

- a. Setiap PGRI Cabang/Cabang Khusus memperoleh 1 (satu) suara dasar.

- b. Selain suara dasar sebagaimana dimaksud pada poin a, PGRI Cabang/Cabang Khusus dapat memperoleh suara tambahan berdasarkan tingkat keaktifan pembayaran iuran dan jumlah anggota sesuai dengan ketentuan berikut.

Pembayaran iuran 75%–100%

PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran sebesar 75%–100% memperoleh suara tambahan berdasarkan jumlah anggota sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota 1–200 orang memperoleh 1 (satu) suara tambahan.
- 2) Jumlah anggota 201–400 orang memperoleh 2 (dua) suara tambahan.
- 3) Jumlah anggota 401–600 orang memperoleh 3 (tiga) suara tambahan.
- 4) Jumlah anggota 601–800 orang memperoleh 4 (empat) suara tambahan.
- 5) Jumlah anggota 801–1.000 orang memperoleh 5 (lima) suara tambahan.
- 6) Jumlah anggota 1.001–1.350 orang memperoleh 6 (enam) suara tambahan.
- 7) Jumlah anggota 1.351–1.700 orang memperoleh 7 (tujuh) suara tambahan.
- 8) Jumlah anggota lebih dari 1.700 orang memperoleh tambahan 1 (satu) suara untuk setiap kelipatan 350 anggota, sesuai dengan ketentuan organisasi.

Pembayaran iuran 50%–74%

PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran sebesar 50%–74% memperoleh 1 (satu) suara tambahan untuk setiap kelipatan 350 anggota yang membayar iuran, sesuai dengan ketentuan organisasi.

Pembayaran iuran di bawah 50%

PGRI Cabang/Cabang Khusus yang aktif membayar iuran di bawah 50% hanya memperoleh 1 (satu) suara dasar sebagaimana dimaksud dalam pada nomor 4 poin a.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini ditetapkan oleh pimpinan konferensi bersama peserta melalui musyawarah.
2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan AD/ART PGRI dan keputusan organisasi yang lebih tinggi.

3. Tata tertib ini berlaku sejak disahkan dalam sidang pleno Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026.

Jambi, 24 Oktober 2026

PIMPINAN KONFERENSI KERJA I
PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

Ketua,

Sekretaris Umum,

H. Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd.
NPA. 15710126423

Khairu Azmi, S.P., M.M.
NPA. 15040505254

BAB III
RANCANGAN KEPUTUSAN
KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Nomor:/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026

TENTANG

JADWAL ACARA KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Menimbang:

- a. bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029, diperlukan jadwal acara yang terarah dan sistematis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 tentang Jadwal Acara Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

Mengingat:

1. Akta Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024;
2. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor IV/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Program Persatuan Guru Republik Indonesia dan Anggaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
3. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
4. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor X/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Penetapan Ketua Umum, Ketua, dan

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;

5. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 08/Kep/PB/XXIII/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
6. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 32/Kep/PB/XXIII/2026 tanggal 3 September 2026 tentang Susunan dan Personalia Pengurus dan Dewan Pembina PGRI Provinsi Jambi Penggantian Antarwaktu Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
7. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Nomor 306/Kep/PGRI.Jambi/XXIII/2026 tentang Penyelenggaraan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

Memperhatikan:

Saran dan pendapat yang disampaikan dalam Sidang Pleno I Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029 TENTANG JADWAL ACARA KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029.

KESATU :

Mengesahkan Jadwal Acara Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 sebagaimana telah dibahas dan disetujui dalam Sidang Pleno I.

KEDUA :

Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA :

Jadwal Acara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi pimpinan konferensi, panitia penyelenggara, dan peserta dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan konferensi.

KEEMPAT :

Perubahan Jadwal Acara dapat dilakukan apabila diperlukan demi kelancaran penyelenggaraan konferensi, dengan persetujuan pimpinan konferensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 24 Oktober 2026

PIMPINAN KONFERENSI KERJA I
PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

Ketua,

Sekretaris Umum,

H. Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd.

NPA. 15710126423

Khairu Azmi, S.P., M.M.

NPA. 15040505254

LAMPIRAN: RANCANGAN KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Nomor :/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026
Tanggal : 24 Oktober 2026
Tentang : Jadwal Acara Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029

JADWAL ACARA
KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Hari/Tanggal : Sabtu–Minggu, 24–25 Oktober 2026

Tempat : Hotel Sutha Inn Syariah, Jambi

HARI PERTAMA — SABTU, 24 OKTOBER 2026

Waktu	Acara	Penyaji/Petugas	Penanggung Jawab
12.00–14.00	Registrasi peserta Konferensi Kerja I	Panitia registrasi	Panitia Pelaksana (OC)
14.00–15.30	Pembuatan Website Organisasi	Solbi, S.Pd., M.Pd	Panitia Pelaksana (OC)
15.30–16.00	Istirahat (<i>coffee break</i>)	—	Panitia Pelaksana (OC)
16.00–17.00	Pembukaan: - Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PGRI - Doa - Sambutan Ketua Panitia - Sambutan Ketua PGRI Provinsi Jambi	MC: Siti Rodiah, S.Pd. Susana Mariyanto, S.Pd. H. Abuzar, S.Pd., M.El Dr. H. Darma Putra, M.PKim. H. Nanang Sunarya, M.Pd.	Panitia Pengarah (SC)
17.00–17.45	Sidang Pleno I - Pengantar dari Ketua PGRI - Pengasahan Jadwal Acara - Pengesahan Tata Tertib	Pimpinan Sidang	Panitia Pengarah (SC)
17.45–19.30	Istirahat, sholat, dan makan (ISHOMA)	—	Panitia Pelaksana (OC)
19.30–20.30	Laporan Pengurus dan RAPBO	H. Nanang Sunarya, M.Pd.	Panitia Pelaksana (OC)

Waktu	Acara	Penyaji/Petugas	Penanggung Jawab
20.30-21.30	Tanggapan Pengurus PGRI Kab/Kota dan Laporan Kegiatan	Pimpinan Sidang	Panitia Pelaksana (OC)
21.30-06.00	Istirahat	—	Panitia Pelaksana (OC)

HARI KEDUA — MINGGU, 25 OKTOBER 2026

Waktu	Acara	Penyaji/Petugas	Penanggung Jawab
06.00-08.00	Sarapan pagi (<i>breakfast</i>)	—	Panitia Pelaksana (OC)
08.00-09.00	Paparan dari Kejaksaan Tinggi Jambi	Kajati	Khairu Azmi, S.Pd., M.Pd
09.00-10.00	Paparan dari LKBH	Dr. Sarbaini, S.H., M.H.	H. Ismiyanto, M.Pd.
10.00-11.00	Pembahasan Rekomendasi	Dra. Jamilah	Panitia Pengarah (SC)
11.00-11.30	Upacara Penutupan - Pembacaan Pernyataan Konferensi Kerja - Laporan Ketua Panitia Pelaksana - Sambutan Ketua PGRI Provinsi Jambi sekaligus menutup kegiatan konkerprov I 2026. - Pembacaan doa	MC: Siti Rodiah, S.Pd.	Panitia Pelaksana (OC)
11.30-12.00	Makan siang dan Check-out	Seluruh peserta	Panitia Pelaksana (OC)

Keterangan:

1. OC (*Organizing Committee*) adalah Panitia Pelaksana.
2. SC (*Steering Committee*) adalah Panitia Pengarah.

3. Jadwal acara dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan keputusan pimpinan konferensi.
4. Waktu pelaksanaan setiap kegiatan agar diperhatikan oleh seluruh petugas dan peserta konferensi.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 24 Oktober 2026

PIMPINAN KONFERENSI KERJA I
PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

Ketua,

Sekretaris Umum,

H. Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd.
NPA. 15710126423

Khairu Azmi, S.P., M.M.
NPA. 15040505254

BAB IV

RANCANGAN KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Nomor :/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026

TENTANG

PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
DAN KEUANGAN PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029
PERIODE JULI 2025–JUNI 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Menimbang:

- a. bahwa Pengurus PGRI Provinsi Jambi Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 telah melaksanakan program kerja dan pengelolaan keuangan selama periode Juli 2025–Juni 2026;
- b. bahwa laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan tersebut telah disampaikan dan dibahas dalam Sidang Pleno Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029, dengan memperhatikan pandangan umum serta laporan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
- c. bahwa berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 tentang Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Keuangan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Periode Juli 2025–Juni 2026.

Mengingat:

1. Akta Pengakuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan pengakuan PGRI sebagai badan hukum, sebagaimana telah diperbarui terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000332.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024;

2. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor IV/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Program Persatuan Guru Republik Indonesia dan Anggaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
3. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
4. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor X/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Penetapan Ketua Umum, Ketua, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
5. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 08/Kep/PB/XXIII/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
6. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 32/Kep/PB/XXIII/2026 tanggal 3 September 2026 tentang Susunan dan Personalia Pengurus dan Dewan Pembina PGRI Provinsi Jambi Penggantian Antarwaktu Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
7. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Nomor 306/Kep/PGRI.Jambi/XXIII/2026 tentang Penyelenggaraan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

Memperhatikan:

1. Laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2025–Juni 2026;
2. Pandangan umum dan laporan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang disampaikan dalam sidang pleno;
3. Tanggapan Pengurus PGRI Provinsi Jambi atas pandangan umum dan laporan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
4. Hasil pembahasan dan kesepakatan dalam sidang pleno Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

MEMUTUSKAN**Menetapkan:**

KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029 TENTANG PENGESAHAN LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DAN KEUANGAN PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI PERIODE JULI 2025–JUNI 2026.

KESATU :

Mengesahkan Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Keuangan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 untuk periode Juli 2025–Juni 2026 berdasarkan hasil pembahasan dalam Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026.

KEDUA :

Laporan Pelaksanaan Program Kerja dan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini menjadi dasar bagi Pengurus PGRI Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti hasil pembahasan dan rekomendasi konferensi sesuai dengan kewenangan serta ketentuan organisasi.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi

Pada tanggal: 25 Oktober 2026

PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI

Selaku

PIMPINAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Ketua,

Sekretaris Umum,

H. Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd.

NPA. 15710126423

Khairu Azmi, S.P., M.M.

NPA. 15040505254

Lampiran : Rancangan Keputusan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024-2029
Nomor :/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026
Tanggal : Oktober 2026
Tentang : Laporan Pelaksanaan Program Kerja Pengurus PGRI Provinsi Jambi Periode Juli 2025–Juni 2026

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024-2029
JULI TAHUN 2025 - JUNI TAHUN 2026

1. Pendahuluan

Berdasarkan amanat Pasal 100 Anggaran Rumah Tangga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Konferensi Kerja PGRI Provinsi adalah rapat antar pengurus kabupaten/kota yang diselenggarakan Pengurus PGRI Provinsi dan merupakan forum organisasi tertinggi di bawah Konferensi PGRI Provinsi. Forum ini dilaksanakan satu tahun sekali untuk menetapkan garis kebijakan yang belum ditetapkan dalam Konferensi PGRI Provinsi selama masa antara Konferensi PGRI Provinsi.

Agenda utama dalam Konferensi Kerja PGRI Provinsi, Pengurus PGRI Provinsi Jambi melaporkan hasil pelaksanaan program dan keuangan Tahun 2026 serta menetapkan program kerja dan APBO Pengurus PGRI Provinsi Jambi Tahun 2027.

Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jambi merupakan forum organisasi yang strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai permasalahan organisasi, serta merumuskan langkah-langkah kebijakan dan program kerja yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Forum ini juga menjadi wahana konsolidasi organisasi dalam memperkuat solidaritas, meningkatkan efektivitas tata kelola, dan meneguhkan komitmen seluruh jajaran PGRI dalam menjalankan amanat organisasi.

Laporan Umum ini disusun sebagai bentuk penyampaian informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Pengurus PGRI Provinsi Jambi selama periode pelaporan. Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan tugas organisasi, perkembangan program kerja, upaya penguatan kelembagaan, perjuangan aspirasi anggota, peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, serta berbagai capaian dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan roda organisasi.

Dalam pelaksanaannya, PGRI Provinsi Jambi terus berupaya menjalankan peran sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan yang berpijak pada nilai-nilai perjuangan guru, semangat kebersamaan, kemandirian, demokrasi organisasi, serta kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI. Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat posisi guru sebagai tenaga profesional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa pelaksanaan program kerja organisasi tidak terlepas dari berbagai dinamika, tantangan, dan keterbatasan. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisatoris, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan evaluasi bersama untuk mengetahui tingkat ketercapaian program, mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki, serta merumuskan strategi pengembangan organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan anggota.

"Konferensi Kerja II PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Soeta Inn Jambi pada tanggal 24-25 Oktober 2026 selain memiliki agenda utama dimaksud, juga menetapkan kebijakan organisasi yang belum ditetapkan dalam Konferensi PGRI Provinsi Jambi ataupun Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jambi sebelumnya."

Pengurus PGRI Provinsi Jambi Masa Bakti XXIII tahun 2024-2029 dalam Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jambi ini melaporkan berbagai aktivitas, kegiatan, dan kebijakan organisasi yang sudah dilaksanakan tahun 2026. Pelaksanaan program kerja di tahun 2026 didasarkan pada hasil Konferensi PGRI Provinsi Jambi Masa bakti XXIII PGRI tahun 2024-2029.

Berbagai aktivitas organisasi telah dilaksanakan Pengurus PGRI Provinsi Jambi selama tahun 2026 berupa kegiatan forum-forum organisasi, peningkatan kompetensi guru kerjasama dengan berbagai pihak terkait, advokasi, kegiatan kaderisasi, perempuan PGRI, kegiatan kelengkapan organisasi, peringatan HUT kemerdekaan ke-80 RI, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan secara tatap muka langsung maupun kegiatan yang diselenggarakan secara daring. Implementasi program kerja sebagai upaya untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan organisasi PGRI di Provinsi Jambi.

Melalui Konferensi Kerja ini, diharapkan seluruh peserta dapat memberikan pandangan, masukan, dan rekomendasi yang konstruktif demi penyempurnaan program kerja organisasi. Pembahasan hendaknya senantiasa berorientasi pada kepentingan anggota, penguatan kapasitas organisasi, perlindungan profesi guru, peningkatan kesejahteraan, serta kontribusi nyata PGRI dalam mendukung pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi.

Secara sistematis, laporan pelaksanaan program kerja Pengurus PGRI Provinsi Jambi periode Juli 2025–Juni 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan;
2. Laporan Umum dan Program Mandatori;
3. Laporan Biro dan Perangkat Kelengkapan Organisasi;
4. Laporan Keuangan; dan
5. Penutup.

B. Laporan Umum

Pengurus PGRI Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan organisasi yang memprioritaskan membangun hubungan dan jejaring kuat dengan pemerintah dan pemerintah daerah dan tetap menjaga jati diri organisasi yang bersifat **independen, unitaristik, dan non-partisan**.



The infographic features the PGRI logo at the top left. The main text states: 'Pengurus PGRI Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan organisasi yang memprioritaskan membangun hubungan dan jejaring kuat dengan pemerintah dan pemerintah daerah dan tetap menjaga jati diri organisasi yang bersifat **independen, unitaristik, dan non-partisan**.' Below this, there are two photographs: one of a meeting and one of a group photo. To the right, under the heading 'JATI DIRI ORGANISASI', are three boxes: 'INDEPENDEN' (Bebas dari intervensi pihak manapun), 'UNITARISTIK' (Satu kesatuan dalam organisasi), and 'NON-PARTISAN' (Tidak berafiliasi dengan partai politik). At the bottom, four icons represent: 'Membangun hubungan dengan Pemerintah', 'Memperkuat jejaring dengan Pemerintah Daerah', 'Menjalin kolaborasi untuk kemajuan pendidikan', and 'Menjaga soliditas organisasi dan profesionalisme guru'. A slogan at the bottom right reads 'Guru Bersatu Pendidikan Maju Jambi Hebat'.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Pengurus PGRI Provinsi Jambi menggerakkan perangkat kelengkapan organisasi berjuang melayani, mengabdikan untuk profesionalisme, kesejahteraan, dan perlindungan guru, guna mewujudkan PGRI sebagai organisasi yang terpercaya, dinamis, kuat, dan bermartabat. Kegiatan ini ditetapkan sebagai respon atas upaya-upaya mendelegitimasi PGRI sebagai organisasi profesi. Sebagai upaya menjaga kolaborasi dan sinergi, PGRI terus menjaga hubungan baik dan memperkuat hubungan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan birokrasi memberikan dampak menguatnya kepercayaan pemerintah, masyarakat, dan anggota kepada PGRI.

Program Mandatori & Transformasi

Mewujudkan visi & misi melalui bentuk pelayanan organisasi, pengelolaan keuangan, transformasi digital, pelayanan peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan.

Advokasi & Kampanye

Advokasi menuju guru yang bermartabat, sejahtera, profesional, dan terlindungi. Berkontribusi nyata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Generasi Emas tahun 2045.

Pengurus PGRI Provinsi Jambi menjadi pembicara dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun komunitas masyarakat, baik secara daring maupun luring, tentang isu-isu aktual kebijakan pendidikan dan guru. Semua dilakukan dalam rangka memberikan kontribusi pikiran dan saran konstruktif dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi. Pengurus PGRI Provinsi Jambi juga aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Pengurus Besar bekerja sama dengan Education International (EI) secara daring dalam mewujudkan PGRI KIDS (Kuat, Independen, Demokratis, dan Sinambung/Berkelanjutan).

Pengurus PGRI Provinsi Jambi terus mengawal dan menjaga independensi organisasi dengan sebaik-baiknya. PGRI memberikan perhatian penuh terhadap perannya sebagai organisasi profesi yang menjadi kekuatan moral intelektual dan pencerah bangsa. Membangun silaturahmi dengan berbagai elemen bangsa, merajut kebinekaan, dan menjadi oase untuk meneguhkan bingkai persatuan dan kesatuan demi NKRI.

Selain itu, Pengurus PGRI Provinsi Jambi memperkuat efektivitas pelaksanaan forum organisasi, kerja sama dengan berbagai pihak untuk peningkatan profesionalisme guru dan penguatan organisasi, serta advokasi berbagai permasalahan guru dan tenaga kependidikan.

C. Uraian Kegiatan

REKAPITULASI KEGIATAN PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI PERIODE JANUARI–OKTOBER 2026

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Tempat/Keterangan
1	Rapat Pleno Pengurus PGRI Provinsi Jambi	9 Januari 2026	Gedung Guru Jambi
2	Rapat koordinasi dengan Pengurus PGRI Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi terkait permasalahan guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur dan guru honorer SDN 21 Pematang Raman, Kumpeh	15 Januari 2026	Zoom Meeting (daring)
3	Menerima kunjungan Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat dan perwakilan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat	16 Januari 2026	Gedung Grand Kemas

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Tempat/Keterangan
4	Menerima audiensi Pengurus PGRI Kabupaten Muaro Jambi dan Ibu Tri Wulansari, guru honorer SDN 21 Pematang Raman, Kumpeh	21 Januari 2026	Gedung Guru Jambi
5	Mendampingi Pengurus PGRI Kabupaten Muaro Jambi dan Ibu Tri Wulansari, guru honorer SDN 21 Pematang Raman, Kumpeh, ke Polres Muaro Jambi	21 Januari 2026	Ruang Kerja Kapolres Muaro Jambi
6	Menghadiri dan mendampingi pelaksanaan proses <i>Restorative Justice</i> (RJ) yang melibatkan Pengurus PGRI Kabupaten Muaro Jambi, Ibu Tri Wulansari, Kapolres Muaro Jambi, dan Kepala Kejaksaan Negeri Sengeti	21 Januari 2026	Aula Polres Muaro Jambi
7	Audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi	23 Januari 2026	Ruang Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
8	Audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Jambi	26 Januari 2026	Polda Jambi
9	Mengikuti audiensi PB PGRI dan Ketua PGRI Provinsi se-Indonesia dengan Badan Legislasi DPR RI terkait persoalan guru, tata kelola guru, RUU Sisdiknas, dan perlindungan guru	2 Februari 2026	Badan Legislasi DPR RI
10	Menjadi narasumber Dialog <i>Jambi Menyapa</i> RRI Pro 1 Jambi dengan tema "Pengajaran dan Pendidikan"	2 Februari 2026	Studio Pro 1 RRI Jambi
11	Menjadi narasumber <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Badan Legislasi Urusan Daerah (BLUD) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI	6 Februari 2026	Kampus UIN STS Jambi, Mendalo
12	Menjadi narasumber dalam kegiatan Tadarus Edukatif Dewan Eksekutif PB PGRI	3 Maret 2026	Zoom Meeting (daring)
13	Mengikuti Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) II PB PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029	16–18 April 2026	Hotel Golden Boutique, Jakarta

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Tempat/Keterangan
14	Menghadiri dan memberikan penguatan pada acara kelulusan siswa SMK PGRI II Jambi	23 April 2026	Maulidia Convention Center (MCC), Jambi
15	Rapat Pleno Pengurus PGRI Provinsi Jambi membahas rencana pemanfaatan Gedung Guru Jambi untuk kompleks SLB Negeri 1 Kota Jambi	6 Juni 2026	Gedung Guru Jambi
16	Audiensi dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Sepucuk Jambi Sembilan Lurah sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dapil Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, M.M. (HBA), terkait permohonan dukungan bagi keberlanjutan Gedung Guru Jambi dan gagasan penyelesaian konflik guru melalui hukum adat	12 Juni 2026	LAM Provinsi Jambi
17	Mengikuti Deklarasi Bersama Lintas Sektor yang diselenggarakan oleh BPMP Jambi	18-19 Juni 2026	Aston Hotel Jambi
18	Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PB PGRI	23-24 Juni 2026	Hotel Millennium, Jakarta
19	Melaksanakan takziah, menyolatkan, dan mengantarkan jenazah Dr. H. Kemas Arsyad Somad, S.H., M.H., mantan Ketua PGRI Provinsi Jambi, ke pemakaman	6 Juli 2026	Perumahan Kompleks Unja Telanaipura, Masjid Kemas, dan Pemakaman Puteri Ayu
20	Menghadiri dan menandatangani Deklarasi Pemberantasan Geng Motor di Wilayah Jambi	8 Juli 2026	Mapolda Jambi
21	Memimpin Konferensi Luar Biasa PGRI Kota Sungai Penuh	9 Juli 2026	Aula Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
22	Mempublikasikan tulisan berjudul "Kemas Arsyad Somad: Keteladanan di Balik Kekuatan PGRI Jambi"	13 Juli 2026	Harian Jambi Ekspres dan situs web PGRI Jambi
23	Menjadi narasumber dalam <i>talk show</i> SRTV mengenai pembukaan MPLS dan pelepasan siswa PKL	14 Juli 2026	SMK PGRI 2 Jambi

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Tempat/Keterangan
24	Mengikuti Forum Ekonomi dan Bisnis (FEB) Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Jambi	23 Juli 2026	Swiss-Belhotel Jambi
25	Membuka Rapat Kerja Perwakilan YPLP PGRI Provinsi Jambi	1 Agustus 2026	SMK PGRI 2 Jambi
26	Rapat Pleno Pengurus PGRI Provinsi Jambi terkait rencana pelaksanaan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Jambi	8 Agustus 2026	Gedung Guru Jambi
27	Menyambut kedatangan dan mengantarkan penugasan Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI, Bapak Catur Oktaviansyah, sebagai Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 17 Tanjung Jabung Timur	9 Agustus 2026	Bandara Sultan Thaha Jambi dan BPMP Jambi
28	Menghadiri Seminar Sosialisasi Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Batang Hari	20 Agustus 2026	Muara Bulian
29	Melaksanakan kunjungan kerja ke SMA 1 PGRI Jambi	1 September 2026	SMA 1 PGRI Jambi
30	Menerima audiensi pimpinan PT Safa Marwah Wisata Supermarket Travel Umroh terkait rencana kegiatan Umroh Akbar Bersama 1.000 Guru Seluruh Indonesia	3 September 2026	Gedung Guru Jambi
31	Menerima audiensi Pengurus PGRI Kabupaten Tanjung Jabung Barat terkait persiapan pelatihan dan lomba menulis cerpen bersama Duta Baca Indonesia, Gol A Gong	5 September 2026	Gedung Guru Jambi
32	Menerima kunjungan dari Bagian Aset Pemerintah Kabupaten Sarolangun	12 September 2026	Gedung Guru Jambi
33	Menerima audiensi Pengurus PGRI Kabupaten Batang Hari terkait persiapan peringatan HUT PGRI Tingkat	23 September 2026	Gedung Guru Jambi

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Tempat/Keterangan
	Provinsi Jambi Tahun 2026 yang dipusatkan di Alun-Alun Muara Bulian		
34	Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Pembelajaran Digital Berbasis HTML dan CSS	30 September 2026	Zoom Meeting (daring)
35	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pengurus PGRI Kabupaten Batang Hari terkait persiapan peringatan HUT PGRI Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2026 di Kabupaten Batang Hari	3 Oktober 2026	Gedung Guru Jambi
36	Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Pembelajaran Digital Berbasis HTML dan CSS Angkatan II	6 Oktober 2026	Zoom Meeting (daring)
37	Melaksanakan audiensi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi terkait peringatan HUT PGRI Tahun 2026 dan permasalahan Gedung Guru Jambi	7 Oktober 2026	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
38	Melaksanakan rapat Panitia Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) PGRI Jambi	13 Oktober 2026	Zoom Meeting (daring)

LAMPIRAN 2: RANCANGAN KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Nomor :/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026
Tanggal : 25 Oktober 2026

TENTANG**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENGURUS PGRI
PROVINSI JAMBI MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029
Periode/Tahun Buku: 2025–2026****I. PENERIMAAN (PENDAPATAN)**

Sumber pendapatan: Iuran Anggota

Perhitungan berdasarkan 26.157 anggota × 12 bulan × Rp1.600,00.

No.	Mata Anggaran	Jumlah
1	Kota Jambi	Rp40.147.200
2	Kabupaten Bungo	Rp103.564.800
3	Kabupaten Batang Hari	Rp48.000.000
4	Kabupaten Sarolangun	Rp38.400.000
5	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp34.560.000
6	Kabupaten Kerinci	Rp50.918.400
7	Kabupaten Tebo	Rp57.600.000
8	Kabupaten Merangin	Rp32.640.000
9	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp34.944.000
10	Kabupaten Muaro Jambi	Rp34.560.000
11	Kota Sungai Penuh	Rp26.880.000
	TOTAL PENERIMAAN	Rp502.214.400

II. PENGELUARAN (BIAYA/BELANJA)

A. Perkantoran

No.	Mata Anggaran	Jumlah
1	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp10.680.750
2	Surat-menyurat	Rp1.500.000
3	Fotokopi	Rp1.500.000
4	Cetakan	Rp1.000.000
5	Dokumentasi	Rp2.000.000
6	Telepon/Internet/TV	Rp6.000.000
7	Koran, Buku, dan Majalah	Rp4.000.000
8	Komputer/Laptop/Printer	Rp10.000.000
9	PDAM	Rp1.756.850
10	Listrik	Rp6.000.000
	JUMLAH A	Rp44.437.600

B. Kerumahtanggaan

No.	Mata Anggaran	Jumlah
1	Air mineral	Rp1.656.000
2	Teh, gula, kopi, makanan ringan/biskuit/permen	Rp1.870.800
3	Makanan harian	—
4	Kebutuhan dapur	—
5	Gas elpiji	—
6	Bahan dan alat kebersihan kantor	Rp3.250.000
7	Kendaraan operasional	—
8	Gedung Guru PGRI	Rp10.000.000
	JUMLAH B	Rp16.776.800

C. Belanja Pegawai, Pengurus, dan Perjalanan Dinas

No.	Mata Anggaran	Jumlah
1	Gaji dan Kesejahteraan	
a.	Gaji karyawan	Rp21.000.000
b.	Uang transportasi staf	—
c.	Uang lembur staf	—
d.	Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan	Rp5.000.000
e.	Transportasi pengurus	—
f.	THR pengurus	—
2	Dana kesehatan pengurus dan karyawan	—
3	Biaya Perjalanan Dinas	
a.	Kunjungan daerah	Rp40.000.000
b.	Kunjungan luar negeri (rapat dengan EI dan ACT)	Rp25.000.000
	JUMLAH C	Rp91.000.000

D. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

No.	Mata Anggaran	Jumlah
1	Rapat-rapat	
a.	Rapat pleno pengurus	Rp3.500.000
b.	Rapat pengurus harian	Rp1.500.000
c.	Rapat gabungan dengan instansi	Rp7.500.000
2	Konferensi Kerja Nasional (Konkernas)	Rp60.000.000
3	Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov)	Rp75.000.000
4	Konferensi Kerja Kota/Kabupaten (Konkerkot/Konkerkab)	Rp15.000.000
5	Rakorpimnas/Rakornas	Rp18.500.000

6	Rakorprov	Rp3.000.000
7	Kongres	—
8	Konferensi Provinsi (Konprov)	—
9	Konferensi Kota/Kabupaten (Konkot/Konkab)	—
10	Biaya organisasi/biro	Rp23.000.000
11	Biaya tim verifikasi	Rp10.000.000
	JUMLAH D	Rp217.000.000

E. Pengembangan Profesi dan Perlindungan Hukum

No.	Mata Anggaran	Jumlah
1	Pelatihan, Seminar, dan Lokakarya	
a.	Pelatihan kepemimpinan, keanggotaan, keuangan, dan program mandatori	Rp25.000.000
b.	Seminar	Rp1.500.000
c.	Lokakarya (<i>workshop</i>)	Rp1.500.000
2	Dewan Kehormatan Guru Indonesia (DKGI)	—
3	Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)	Rp20.000.000
4	Advokasi dan audiensi	Rp12.500.000
	JUMLAH E	Rp60.500.000

F. Umum

No.	Mata Anggaran	Jumlah
1	Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	
a.	Peringatan hari besar nasional	Rp2.500.000
b.	Peringatan hari besar keagamaan	Rp5.000.000
c.	HUT PGRI	Rp35.000.000

2	Biaya administrasi bank	Rp1.500.000
3	Kartu Tanda Anggota (KTA) PGRI	—
4	Usaha penjualan (baju PGRI, kaos PGRI, dan produk lainnya)	—
5	Publikasi	Rp7.500.000
6	Dana sosial dan umum	Rp21.000.000
	JUMLAH F	Rp72.500.000

III. REKAPITULASI KEUANGAN

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah A. Perkantoran	Rp44.437.600
2	Jumlah B. Kerumahtanggaan	Rp16.776.800
3	Jumlah C. Belanja Pegawai, Pengurus, dan Perjalanan Dinas	Rp91.000.000
4	Jumlah D. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	Rp217.000.000
5	Jumlah E. Pengembangan Profesi dan Perlindungan Hukum	Rp60.500.000
6	Jumlah F. Umum	Rp72.500.000
	TOTAL PENGELUARAN	Rp502.214.400
	TOTAL PENERIMAAN	Rp502.214.400
	SALDO AKHIR (PENERIMAAN - PENGELUARAN)	Rp0

Jambi, 15 Oktober 2026

Mengetahui,

Ketua,

Bendahara,

H. NANANG SUNARYA, M.Pd.
 NPA. 15710126423

Hj. IVO KERISTIANA, S.E.
 NPA. 15711025676

BAB V

RANCANGAN KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

Nomor:/KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026

Tentang

PROGRAM MANDATORI TAHUN 2026–2027 PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

- Menimbang:**
- a. bahwa Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 telah diselenggarakan pada tanggal 25 s.d. 27 September 2026 di Jambi;
 - b. bahwa untuk menyamakan persepsi serta mengimplementasikan kebijakan organisasi guna mencapai tujuan bersama, Pengurus PGRI Provinsi Jambi perlu menetapkan Program Mandatori Pengurus PGRI Provinsi Jambi Periode Juli 2026 – Juni 2027 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 sebagai acuan bagi pengurus di semua tingkatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 tentang Program Mandatori Pengurus PGRI Provinsi Jambi Periode Juli 2026 – Juni 2027 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029.

- Mengingat :**
1. Akta Pengakuan Menteri Kehakiman RI Nomor J.A. 5/82/12 tanggal 20 September 1954 tentang Pengesahan Anggaran Dasar PGRI dan Pengakuan PGRI sebagai Badan Hukum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0000332.AH.01.08.Tahun 2024 tanggal 8 Maret 2024;
 2. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor IV/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Program Persatuan Guru Republik Indonesia dan Anggaran Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;

3. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor V/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
4. Keputusan Kongres XXIII Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor X/KONGRES/XXIII/PGRI/2024 tentang Penetapan Ketua Umum, Ketua, dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
5. Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 08/Kep/PB/XXIII/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
6. Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 32/Kep/PB/XXIII/2026 tanggal 3 September 2026 tentang Susunan dan Personalia Pengurus dan Dewan Pembina PGRI Provinsi Jambi Penggantian Antarwaktu Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
7. Keputusan Pengurus PGRI Provinsi Jambi Nomor 306/Kep/PGRI.Jambi/XXIII/2026 tentang Penyelenggaraan Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;

Memperhatikan

1. Laporan Program Kerja Pengurus PGRI Provinsi Jambi, serta Pandangan Umum dan Laporan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi pada Rapat Pleno ... dan Rapat Pleno ... Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029;
2. Tanggapan Pengurus PGRI Provinsi Jambi pada Rapat Pleno Konferensi Kerja I PGRI Provinsi Jambi Tahun 2026 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 atas Pandangan Umum dan Laporan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;

MEMUTUSKAN:**Menetapkan:**

KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029 TENTANG PROGRAM MANDATORI PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI PERIODE JULI 2026 – JUNI 2027 MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029.

PERTAMA:

Mengesahkan Program Mandatori Pengurus PGRI Provinsi Jambi Periode Juli 2026 – Juni 2027 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 untuk dilaksanakan oleh Pengurus PGRI Provinsi Jambi serta menjadi pedoman bagi Pengurus PGRI di semua tingkatan.

KEDUA:

Penjabaran dan rincian Program Mandatori Pengurus PGRI Provinsi Jambi Periode Juli 2026 – Juni 2027 Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA:

Mewajibkan Pengurus PGRI di semua tingkatan untuk melaksanakan Program Mandatori PGRI sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kongres XXIII PGRI Nomor IV/KONGRES/XXIII/PGRI/2024.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : Oktober 2026

PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI

Selaku

**PIMPINAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026
MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029**

Ketua,

Sekretaris Umum,

H. Nanang Sunarya, S.Pd., M.Pd.
NPA. 15710126423

Khairu Azmi, S.P., M.M.
NPA. 15040505254

LAMPIRAN I: RANCANGAN KEPUTUSAN KONFERENSI KERJA I PGRI PROVINSI JAMBI TAHUN 2026

NOMOR : .../KONKERPROV I/PGRI.JAMBI/XXIII/2026
TANGGAL : ... OKTOBER 2026
TENTANG :

PROGRAM MANDATORI TAHUN 2026–2027
PENGURUS PGRI PROVINSI JAMBI MASA BAKTI XXIII TAHUN 2024–2029

1. PENDAHULUAN

Pasca Kongres PGRI Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029, Pengurus Besar PGRI terpilih memiliki tugas berat dan sangat strategis.

- **Pertama**, secara internal PGRI melakukan konsolidasi organisasi untuk membangun entitas yang lebih transformatif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Langkah ini tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dasar organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PGRI di seluruh jenjang kepengurusan, mulai dari Pengurus Besar, PGRI Provinsi/Daerah Istimewa, Kabupaten/Kota, Cabang/Cabang Khusus, hingga Ranting/Ranting Khusus.
- **Kedua**, PGRI membangun komitmen, integritas, soliditas, dan solidaritas segenap pengurus serta anggota melalui pelayanan prima bagi guru dan pengawasan mutu serta pemerataan pendidikan.
- **Ketiga**, PGRI menjalin sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah, sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mitra strategis lainnya untuk memajukan pendidikan nasional menuju terwujudnya guru yang mulia, bermartabat, profesional, sejahtera, dan terlindungi.
- **Keempat**, PGRI mengoptimalkan peran perangkat kelengkapan organisasi, Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP), badan khusus, dan badan usaha lainnya guna mewujudkan cita-cita serta harapan organisasi.
- **Kelima**, PGRI meningkatkan peran aktif dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua (*quality education for all*), baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Peran strategis PGRI tercermin dari pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART PGRI untuk mewujudkan guru Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara khusus, PGRI bertugas membina asosiasi profesi, mempersatukan seluruh guru, serta menyelenggarakan pendidikan profesi guna meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan guru. Perjuangan panjang ini membutuhkan strategi yang terencana dan konsisten.

Pengurus PGRI Provinsi Jambi Masa Bakti XXIII Tahun 2024–2029 dalam mengimplementasikan tugasnya menghadapi tantangan yang sangat dinamis, baik dari dalam organisasi maupun dari isu-isu sentral pendidikan nasional dan internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, PGRI merumuskan program kerja lima tahunan melalui Konferensi PGRI Provinsi Jambi serta menetapkan program kerja tahunan melalui Konferensi Kerja PGRI Provinsi Jambi.

Sebagai mitra strategis, kritis, dan konstruktif bagi pemerintah dan pemerintah daerah, PGRI terus berikhtiar memajukan pendidikan nasional. Agenda perjuangan PGRI tidak semata-mata untuk kepentingan anggota, tetapi juga demi kepentingan peserta didik, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan jati diri PGRI sebagai organisasi perjuangan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan AD/ART PGRI.

Sebagai organisasi modern, PGRI terus memperkuat tata kelola data keanggotaan. PGRI memperkuat program mandatori yang dilaksanakan secara berjenjang dari Pengurus Besar hingga Pengurus Cabang dan Ranting melalui pengembangan Sistem Informasi Keanggotaan (SIK) Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital. Sistem ini terintegrasi dengan pengelolaan iuran anggota, profil pengurus, pengembangan keprofesian guru, serta perlindungan guru melalui program Lingkar Belajar Guru (*Teachers Learning Cycle/TLC*) yang didukung oleh Education International (EI) Asia-Pacific dan Konsorsium Proyek Organisasi Guru Dunia terdiri atas *Australian Education Union/AEU*, *Utdanningsforbundet/UEN* Norwegia, *Sveriges Lärare/LS* Swedia, dan *Japan Teachers Union/JTU*.

Selain SIK, program mandatori lainnya mencakup kegiatan peningkatan kompetensi dan profesionalisme anggota. Guru dituntut untuk terus mengembangkan diri agar memenuhi kompetensi secara komprehensif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Oleh karena itu, PGRI di semua tingkatan wajib menyelenggarakan program mandatori peningkatan profesi, seperti lokakarya pembelajaran, penulisan karya ilmiah, lokakarya pengembangan kapasitas pribadi dan sosial, serta kegiatan relevan lainnya.

Kegiatan pengembangan profesi harus lebih ditonjolkan daripada sekadar seremoni biasa, khususnya saat menyambut Bulan Guru pada bulan November. PGRI aktif mengoreksi dan mensosialisasikan bahwa bulan November merupakan Bulan Guru. Seluruh kegiatan profesi wajib dipublikasikan melalui berbagai media sosial agar manfaat keanggotaan PGRI dapat dirasakan secara nyata oleh para guru. Dalam konteks ini, Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis (APKS) PGRI memegang peranan kunci untuk mengoptimalkan pelaksanaan program-program profesi sekaligus memberi ruang bagi kader-kader muda dari berbagai bidang studi yang belum terakomodasi dalam struktur kepengurusan.

PGRI juga terus memperkuat kelembagaan melalui penataan kaderisasi hingga tingkat cabang dan ranting, serta memelihara soliditas dan solidaritas anggota maupun pengurus. Soliditas, Solidaritas, Integritas, dan Profesionalitas (SSIP) ditetapkan sebagai nilai-nilai utama perjuangan yang harus dirawat dan diwujudkan bersama:

1. **Soliditas:** Mewujudkan kekuatan, kekokohan, dan kesatuan internal organisasi.
2. **Solidaritas:** Membangun rasa kebersamaan, kepedulian, dan sikap saling mendukung antaranggota.
3. **Integritas:** Menanamkan nilai moral dan etika keprofesian guru.
4. **Profesionalitas:** Menjadikan kompetensi profesi sebagai landasan utama dalam bertindak.

Sebagai organisasi profesi yang bermartabat, PGRI terus bertransformasi menjadi organisasi modern yang **Kuat, Independen, Demokratis, dan Sinambung (KIDS)**. PGRI berkomitmen menjadi kekuatan moral-intelektual bangsa dengan menempatkan profesionalisme sebagai pilar utama.

Perjuangan hak dan aspirasi anggota dalam memperoleh kesejahteraan, perlindungan hukum, kepastian status, serta rasa aman dalam menjalankan tugas karier dan pengembangan profesi harus diwujudkan secara bersungguh-sungguh oleh seluruh pengurus. Pendekatan perjuangan mengedepankan cara-cara komunikatif dan bermartabat, seperti dialog, diskusi, audiensi, negosiasi, dan advokasi.

Pimpinan organisasi dituntut memiliki kemampuan komunikasi sosial-politik yang luwes dan tepat, serta didukung kewibawaan akademik dan ketangguhan berjuang di era informasi yang terbuka dan kritis.

PGRI memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan guru perempuan. Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap agenda Pemerintah Indonesia, Education International (EI), dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Melalui badan khusus **Perempuan PGRI** yang diakui dalam AD/ART PGRI, organisasi menyuarkan pengarusutamaan kesetaraan gender, pelatihan kepemimpinan, pendampingan sosial, serta riset pemberdayaan perempuan.

Sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan, PGRI aktif memberikan solusi atas berbagai persoalan guru dan tenaga kependidikan, termasuk penyelesaian status guru honorer, guru sekolah swasta, serta guru di bawah naungan Kementerian Agama. PGRI berkomitmen menjadi rumah aspirasi yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya.

Lembaga pendidikan PGRI—dari jenjang PAUD, pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi—merupakan etalase, alat perjuangan, dan warisan (*legacy*) organisasi. PGRI menyadari pentingnya menjaga mutu dan tata kelola

lembaga pendidikan tersebut di tengah ketatnya standar regulasi dan persaingan antar lembaga. Tata kelola kelembagaan dan badan penyelenggara pendidikan PGRI perlu ditata ulang agar tetap relevan, unggul, dan menyatu secara emosional maupun kultural dengan organisasi.

Dalam memperkuat perannya, PGRI terus menyelaraskan diri (*alignment*) dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Kementerian Agama (Kemenag), KemenPAN-RB, Bappenas, BKN, legislatif, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta dunia usaha/dunia industri (DUDI).

Di tingkat internasional, kerja sama PGRI makin kukuh melalui konsorsium EIAP-Consortium Project untuk penguatan kapasitas pengurus dan modernisasi organisasi. Kepemimpinan PGRI juga diakui secara global dengan terpilihnya Ketua Umum PB PGRI dalam *Education International Asia-Pacific Committee*. Selain itu, PGRI memprakarsai kembalinya *ASEAN Council of Teachers Plus South Korea (ACT+1)* ke dalam Sekretariat ASEAN, di mana Kantor Pengurus Besar PGRI dipercaya sebagai Sekretariat ACT+1. PGRI juga menjalin kemitraan strategis dengan organisasi guru internasional seperti *Eğitim-Bir-Sen* (Turki), *Anglia English*, dan lembaga dunia lainnya.

Menghadapi era disrupsi, PGRI siap mengantisipasi tantangan internal dan eksternal secara bijaksana. Regulasi yang terbuka terhadap hadirnya organisasi profesi lain direspons PGRI dengan melakukan *rebranding* perjuangan sebagai kekuatan moral-intelektual. Strategi perjuangan dibagi menjadi dua pendekatan:

1. **Pragmatis:** Merespons dan memperjuangkan secara langsung kebutuhan serta masalah nyata guru di lapangan.
2. **Strategis:** Merumuskan kebijakan jangka panjang untuk penguatan posisi tawar dan profesionalisme guru.

PGRI berkomitmen menjadikan kantor organisasi di semua tingkatan sebagai Pusat Belajar (*Learning Center*) yang inklusif untuk melayani kebutuhan pengembangan profesi anggota dan menjadi ruang kolaborasi dengan berbagai pihak. PGRI menyadari bahwa di era keberlimpahan sumber daya (*abundance era*), organisasi yang responsif dan adaptif lah yang akan terus maju dan bertahan.

Khusus untuk Provinsi Jambi, PGRI tetap fokus mengawal pemenuhan kebutuhan guru serta mendorong tuntasnya pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berdasarkan dinamika tersebut, Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) I PGRI Jambi Tahun 2026 merumuskan program kerja strategis yang tertuang dalam Program Mandatori.

2. PROGRAM MANDATORI PGRI

Program Mandatori PGRI Masa Bakti XXIII merupakan keberlanjutan dan penyempurnaan dari program *Sapta Karsa PGRI* (Kongres XXII PGRI Tahun 2019–2024) yang kini dikembangkan menjadi **Dasa Karsa PGRI** berdasarkan hasil Kongres XXIII PGRI Tahun 2024. Program ini difokuskan pada kegiatan-kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh pengurus PGRI di semua tingkatan.

Meskipun Program Mandatori telah digulirkan sejak Konkernas II PGRI Tahun 2022 dan diperkuat pada Kongres XXIII Tahun 2024, pemantauan dan evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaannya di tingkat daerah belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan laporan dari Pengurus PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota, berikut adalah pemetaan kondisi, kendala, serta langkah solusi yang dirumuskan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Mandatori.

B. MATRIKS 10 BIDANG PROGRAM MANDATORI PGRI TAHUN 2027

1. Transformasi dan Digitalisasi Organisasi

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
1	a. Pengelolaan organisasi berbasis data belum membudaya dan peran LKKP PGRI belum optimal. b. Publikasi kegiatan melalui media sosial telah dilakukan, tetapi pemanfaatannya oleh seluruh pengurus belum optimal. c. KTA Digital belum dimanfaatkan secara optimal oleh anggota. d. Pemanfaatan TIK dalam kegiatan organisasi dan pelayanan anggota belum maksimal.	a. Pengelolaan data belum menjadi prioritas dan kepengurusan LKKP belum terbentuk secara menyeluruh. b. Pengetahuan anggota mengenai media sosial resmi organisasi masih terbatas. c. Pemahaman anggota mengenai manfaat KTA Digital masih rendah. d. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan organisasi belum optimal.	a. Membentuk dan mengoptimalkan kepengurusan LKKP PGRI di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. b. Mengoptimalkan media sosial untuk publikasi kegiatan dan sosialisasi akun resmi PGRI. c. Menyosialisasikan manfaat dan penggunaan KTA Digital pada setiap forum organisasi. d. Mengoptimalkan pemanfaatan TIK untuk meningkatkan kualitas pelayanan anggota.

2. Peningkatan Profesionalitas, Perlindungan, dan Kesejahteraan Guru

No	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
2	a. APKS dan SLCC di tingkat PB PGRI telah aktif. Kepengurusan tingkat provinsi telah terbentuk, tetapi belum seluruh kabupaten/kota aktif. b. Peran DKGI dalam penegakan kode etik guru belum optimal. c. LKBH aktif memberikan pendampingan hukum dan advokasi kepada guru. d. PGRI terus memperjuangkan kesejahteraan guru, baik honorer maupun ASN, di berbagai tingkatan.	a. Peran APKS dan SLCC di tingkat kabupaten/kota belum maksimal dan komunikasi antar jenjang belum berlangsung secara berkelanjutan. b. Ketersediaan personel DKGI yang memiliki kompetensi memadai masih terbatas. c. Dana operasional LKBH terbatas dan pendataan perkara hukum guru belum optimal. d. Sebagian guru honorer belum memperoleh penghasilan yang layak dan peta jalan advokasi kesejahteraan belum tersusun secara menyeluruh.	a. Mengoptimalkan peran APKS dan SLCC dalam peningkatan kompetensi profesional guru. b. Memperkuat kelembagaan, kapasitas, dan sosialisasi fungsi DKGI secara berkelanjutan. c. Melaksanakan rapat koordinasi nasional LKBH serta memperkuat pendampingan dan penanganan kasus hukum guru. d. Melaksanakan advokasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan memperjuangkan penghasilan guru honorer yang layak sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Pengelolaan Keuangan dan Keanggotaan

No	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
3	a. Jumlah anggota PGRI Provinsi Jambi tercatat sebanyak 21.293 orang atau 23,20% dari total guru, dengan peningkatan signifikan setelah bergabungnya PPPK baru. b. Pengelolaan KTA Digital masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan. c. Pemutakhiran serta verifikasi dan validasi data	a. Rekrutmen guru di lingkungan Kementerian Agama dan satuan pendidikan swasta belum optimal. b. Pemahaman pengelola KTA Digital terhadap sistem informasi keanggotaan (SIK) belum merata. c. Pergantian administrator keanggotaan di	a. Menyosialisasikan peran dan manfaat keanggotaan PGRI kepada guru di lingkungan Kementerian Agama dan satuan pendidikan swasta serta meningkatkan rekrutmen anggota. b. Menetapkan administrator SIK KTA Digital dan menyelenggarakan bimbingan teknis secara berkala. c. Melaksanakan pemutakhiran, verifikasi, dan

	anggota dilakukan secara berkala.	daerah menghambat kesinambungan pengelolaan data.	validasi data anggota secara berkelanjutan.
--	-----------------------------------	---	---

4. Pengelolaan dan Akuntabilitas Keuangan Organisasi

No	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
4	a. Pembukuan keuangan PB PGRI telah mengacu pada standar akuntansi yang berlaku, sedangkan penerapannya di daerah belum merata. b. Penerimaan iuran PGRI Provinsi Jambi sampai Juni 2026 tercatat sebesar Rp500.801.300, dengan tingkat keaktifan pembayaran iuran sebesar 52,22%. c. Sebanyak 9 PGRI kabupaten telah melunasi iuran, 2 berada dalam kategori progresif, dan 2 dalam kategori pasif. d. Sistem pemotongan iuran langsung (check-off system) telah berjalan bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.	a. Sebagian bendahara di daerah belum memiliki latar belakang atau kompetensi akuntansi yang memadai. b. Pemahaman mengenai kewajiban pelaporan iuran setiap tiga bulan sebagaimana diatur dalam ART Pasal 141 masih perlu ditingkatkan. c. Kesadaran dan kepatuhan anggota dalam membayar iuran masih perlu diperkuat. d. Pemahaman mengenai urgensi pembentukan dan peran satuan tugas keuangan (Task Force Keuangan) belum seragam.	a. Menyelenggarakan bimbingan teknis pembukuan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku. b. Memperkuat komitmen pengurus dalam menyampaikan laporan iuran secara berkala sesuai ART. c. Mengoptimalkan check-off system dan mengembangkan mekanisme pembayaran iuran melalui KTA Digital. d. Membentuk dan mengoptimalkan peran Task Force Keuangan di setiap tingkatan organisasi.

5. Kaderisasi, Kepemimpinan, dan Peningkatan Kinerja Pengurus

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
5	a. Kaderisasi anggota muda yang potensial menjadi salah satu prioritas program Masa Bakti XXIII.	a. Dominasi pola kepemimpinan senioritas masih menjadi tantangan dalam memberikan ruang kepada kader muda.	a. Menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan PGRI secara berkelanjutan bagi kader muda dan pengurus organisasi.

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
5	b. Pelatihan kepemimpinan bagi pengurus dan kader belum dilaksanakan secara rutin. c. Replikasi program Lingkar Belajar Guru (LBG) di tingkat cabang dan ranting belum berjalan optimal.	b. Pelatihan kepemimpinan belum menjadi agenda rutin di seluruh tingkatan organisasi. c. Pelaksanaan LBG belum sepenuhnya berorientasi pada diskusi dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi guru di lapangan.	b. Menyosialisasikan kembali dan memperbaiki pelaksanaan LBG agar berorientasi pada diskusi, berbagi praktik baik, dan pemecahan masalah nyata. c. Mewajibkan penyampaian laporan kinerja pengurus secara berkala setiap enam bulan.

6. Konsolidasi dan Efektivitas Forum-Forum Organisasi

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
6	a. Konferensi PGRI telah dilaksanakan di 36 provinsi dan 478 kabupaten/kota. b. Rapat pleno dan rapat harian organisasi telah dilaksanakan secara berkala. c. Sistem Informasi Pengurus (SIP) telah terintegrasi dengan KTA Digital.	a. Pelaksanaan keputusan forum organisasi belum konsisten di seluruh tingkatan. b. Pemanfaatan SIP oleh pengurus belum optimal. c. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan forum belum berjalan efektif.	a. Memastikan forum organisasi dilaksanakan tepat waktu serta memperkuat tindak lanjut keputusan secara konsisten. b. Mengoptimalkan pemanfaatan SIP untuk mendukung pengelolaan data dan administrasi kepengurusan. c. Membangun budaya monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap pelaksanaan program dan keputusan organisasi.

7. Peningkatan Kerja Sama dan Pengembangan Usaha

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
7	a. Kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga internasional telah dilaksanakan.	a. Banyak kepengurusan PGRI belum memiliki unit usaha mandiri yang dapat mendukung pembiayaan organisasi. b. Sebagian aset berupa tanah dan bangunan	a. Memperkuat keberlanjutan dan memperluas kemitraan strategis yang memberikan manfaat bagi organisasi dan anggota. b. Melakukan inventarisasi, penataan, dan optimalisasi

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
	b. Pengadaan batik seragam PGRI Kusuma Bangsa telah berjalan. c. Sejumlah daerah telah berhasil mengembangkan unit usaha organisasi.	milik atau yang dikelola lembaga pendidikan PGRI belum dimanfaatkan secara optimal.	pemanfaatan aset yang belum produktif untuk pengembangan usaha dan sumber pendanaan organisasi. c. Mendorong pembentukan unit usaha yang layak, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

8. Penataan dan Penguatan Lembaga Pendidikan PGRI

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
8.	a. Rencana Strategis (Renstra) Persekolahan PGRI telah ditetapkan.	a. Terdapat kesenjangan mutu dan kapasitas pengelolaan yang cukup besar antar lembaga pendidikan PGRI.	a. Melaksanakan program Maju Bersama melalui standarisasi mutu pendidikan, pengembangan Smart School, dan Smart Campus.
	b. Sekitar 15–20% sekolah PGRI berada dalam kategori mapan dan dikelola dengan baik, sedangkan 80–85% lainnya masih berada pada tahap berkembang, bertahan, atau mengalami penurunan.	b. Sebagian aset sekolah masih tercatat atas nama perorangan dan belum sepenuhnya atas nama badan hukum penyelenggara.	b. Menata legalitas dan kepemilikan aset pendidikan melalui proses pengalihan hak atau balik nama kepada badan hukum penyelenggara sesuai ketentuan hukum.
	c. Terdapat 48 perguruan tinggi PGRI, beberapa di antaranya telah meraih status akreditasi unggul.	c. Masih terdapat perbedaan pandangan dan hubungan yang kurang harmonis antara badan penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan.	c. Menyosialisasikan Peraturan Organisasi (PO) BPLP serta AD/ART YPLP PGRI untuk memperkuat harmonisasi dan tata kelola lembaga pendidikan.

9. Pemberdayaan Perempuan, Advokasi, dan Kampanye Isu Pendidikan

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
	a. Keterwakilan perempuan di PB PGRI telah mencapai 30% dan target	a. Keterwakilan perempuan dalam jajaran pengurus harian	a. Meningkatkan peran aktif perempuan dalam kepengurusan dan kegiatan PGRI serta

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
	keterwakilan di 24 provinsi telah terpenuhi.	masih perlu ditingkatkan.	mendorong penetapan Ibunda Guru di tingkat kabupaten/kota.
	b. Ibunda Guru tingkat nasional dan provinsi telah ditetapkan. c. PGRI aktif melakukan advokasi terkait pengangkatan PPPK dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) tepat waktu.	b. Masih terdapat guru honorer yang belum memperoleh kepastian status kepegawaian dan pengangkatan sebagai PPPK. c. Kasus kriminalisasi guru dan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan masih menjadi perhatian serius.	b. Memperkuat advokasi dan kampanye berkelanjutan untuk penyelesaian persoalan guru honorer, pengangkatan PPPK, dan perlindungan hukum guru. c. Mengawal penyaluran TPG agar tepat waktu, tepat jumlah, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan melalui edukasi, pendampingan, dan advokasi.

10. Pembangunan Kantor, Peraturan Organisasi, dan Perangkat Kelengkapan

No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
10	a. Gedung kantor PB PGRI dan sebagian besar kantor PGRI tingkat provinsi serta kabupaten/kota telah dimiliki sendiri dan digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. b. Sebagian kantor PGRI kabupaten/kota masih menggunakan atau menumpang pada fasilitas milik pemerintah daerah.	a. Sejumlah gedung kantor belum terawat dengan baik dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan rutin organisasi. b. Keterbatasan anggaran menghambat penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sarana digital kantor yang modern.	a. Melaksanakan pemeliharaan, perbaikan, dan optimalisasi pemanfaatan gedung kantor PGRI di seluruh tingkatan organisasi. b. Mengembangkan infrastruktur digital kantor secara bertahap, meliputi website resmi, media sosial, perangkat TIK, dan sistem administrasi digital. c. Menata dan melengkapi perangkat



No.	Kondisi Saat Ini	Permasalahan	Program Kerja
			organisasi serta memastikan peraturan organisasi disosialisasikan dan dilaksanakan secara konsisten.